

BAB I. PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Uni Eropa sebagai sebuah entitas besar di dunia mempunyai keinginan kuat untuk kembali menjadi salah satu kekuatan besar internasional dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di kancah politik dunia. Penyelesaian konflik yang terjadi antar Israel dan Palestina merupakan jalan bagi Uni Eropa untuk bisa kembali menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa peran aktif Uni Eropa dapat mengukuhkan keberadaan mereka di kawasan tersebut. Posisi yang lima dekade silam masih mereka tempati sebelum digusur oleh Amerika.¹

Selain itu juga posisi Israel di tanah Arab yang cukup dominan menjadikan dirinya seolah penguasa yang dengan mudahnya melakukan kehendaknya tanpa mempertimbangkan peringatan dari dunia internasional. Hal ini cukup menarik karena Uni Eropa ternyata menentang kebijakan Israel yang didukung penuh oleh Amerika. Sehingga adanya fenomena tersebut penulis menganggap bahwa bisa terjadi konflik yang meruncing dalam hubungan antar kedua entitas itu. Dengan penjelasan di atas penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul "*Kebijakan Uni Eropa terhadap Israel*".

¹ Broto Wardoyo, "Hubungan Uni Eropa-Israel", *Kompas*, 6 September 2004.

B. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa peran yang dijalankan oleh Uni Eropa dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Selain itu diharapkan dapat diperoleh hasil dari peran Uni Eropa dalam penyelesaian konflik tersebut. Sedangkan secara khusus, tujuan yang diharapkan adalah dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wawasan berpikir mahasiswa.

C. Latar Belakang Masalah

Hubungan Israel dengan Uni Eropa saat ini berada di titik terendah. Yang menjadi kendala antara lain pembangunan apa yang dinamakan pemerintah Perdana Menteri Ariel Sharon "pagar keamanan", antara Israel dengan wilayah pendudukan Palestina. Komisaris Uni Eropa bidang hubungan internasional, Chris Patten berpendapat pagar itu tidak hanya ilegal tetapi juga dibangun di dalam wilayah pendudukan, sehingga menjadi kendala bagi aturan perdamaian. Tetapi itu bukanlah satu-satunya kritik yang dilancarkan ke arah Menteri Luar Negeri Israel, Silvan Shalom sewaktu berkunjung ke Brussel. Eropa juga mengecam pedas keputusan Israel yang mengusir utusan Uni Eropa untuk Timur Tengah, Marc Otte. Di mata pemerintah Sharon, Otte telah berbuat dosa karena berani bertemu dengan pemimpin Palestina Yasser Arafat.

Pemerintah Israel memang telah menarik kembali keputusan tersebut, sekalipun hanya berlaku untuk utusan Uni Eropa. Menteri Luar Negeri Britania, Jack Straw dalam reaksi dinginnya menyatakan, ia tidak akan datang ke Israel. Menlu Straw seperti juga rekan-rekan Menlu Eropa lainnya dan Komisi Eropa tetap ingin menjaga hubungan baik dengan Arafat. Alasan utamanya adalah karena pemimpin Palestina tetap memainkan peranan utama dalam konflik Israel-Palestina.

Brussel dengan tegas menyatakan diplomasi Eropa tidak akan bisa diatur pemerintah Sharon. Selain itu setelah pemboman di dua sinagoga di Istanbul, Turki, Israel menuduh Eropa sedang menghadapi gelombang anti semitisme, yang membuat suasana tidak semakin baik.²

Jadi cukup banyak konflik antara Israel dan Eropa. Karena Tel Aviv sangat ingin dianggap sebagai Eropa, mereka tidak mengacuhkan kritik-kritik Brussel. Sangat berbeda dengan sikap dingin Brussel, Perdana Menteri Ariel Sharon disambut hangat oleh Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi. Sewaktu tiba di ibu kota Roma, Sharon menyatakan belum pernah mengalami seorang ketua Uni Eropa yang sangat bersahabat seperti Italia. Memang benar, sebagai ketua Uni Eropa Italia menolak mengambil langkah menentang boikot Israel terhadap utusan Eropa. Selain itu Roma juga menyatakan mengerti kebijakan Israel yang membangun dinding sepanjang dan melewati wilayah pendudukan.

Baik Berlusconi maupun Menteri Luar Negeri Italia, Gianfranco Fini dihujani kritik oleh rekan-rekannya di Eropa. Sebagai ketua bergilir, Roma tidak mengikuti arah yang telah diambil Uni Eropa terhadap Israel dan lebih bersikap pro Amerika serta pro Israel. Dapat dikatakan Eropa berbicara dengan dua mulut.

Tidak mengherankan kalau dalam rancangan undang-undang dasar Eropa diusahakan untuk menunjuk seorang menteri luar negeri Eropa dengan satu ketua tetap Uni Eropa, yang menjalankan kebijakan Eropa sepenuhnya dan tidak mengutamakan kepentingan nasionalnya sendiri.

Jika saja di negara-negara muslim diadakan polling mengenai rezim Zionis, tidak diragukan lagi, hasil polling itu akan menunjukkan bahwa rezim ini dianggap sebagai perampok, penumpah darah, serta penyebab ketidaktertenteraman dan ketidakstabilan di Timur Tengah dan di dunia pada umumnya. Tetapi, baru-baru ini ada sebuah fakta yang menakjubkan para pengamat politik yaitu mengenai hasil polling di Uni Eropa mengenai Israel.

Dalam sebuah polling yang dilakukan pada bulan Oktober lalu oleh Komisi Masyarakat Eropa, 59 persen dari rakyat benua ini menyebut Israel sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian dunia. Polling ini dilakukan di semua negara anggota Uni Eropa selain Italia. Mayoritas rakyat negara-negara Eropa tersebut sepakat bahwa Israel adalah ancaman terbesar bagi perdamaian dunia. Bahkan di Belanda, angka penduduk yang menyetujui pendapat ini mencapai 74 persen dan di Austria 69 persen.³

³ http://europa.eu.int/comm/external_relations/mid_mideast/news/ln02_488.htm Chris Patten

Hasil polling Komisi Eropa ini memiliki pengaruh yang penting karena selama ini, Eropa senantiasa memberikan propaganda yang menguntungkan bagi rezim Zionis. Sebagian besar media massa benua ini berada di tangan orang-orang Zionis atau di bawah pengaruh mereka. Biasanya, berita-berita media massa Eropa disusun dan disiarkan untuk kepentingan Zionis.

Oleh karena itu, rakyat Eropa kurang menyadari esensi rezim ini dan dimensi kriminalitas mereka terhadap rakyat Palestina. Mengingat faktor tersebut, tentu tidak disangka-sangka bila mayoritas warga Eropa menganggap Tel Aviv sebagai ancaman terbesar perdamaian dunia.

Israel marah menanggapi survey jajak pendapat yang menunjukkan bukti, bahwa 60% masyarakat Eropa melihat Israel sebagai ancaman terbesar bagi kedamaian dunia. Keyakinan 60 persen warga Eropa atas bahaya Rezim Zionis, menunjukkan kepada para pemilik media massa Barat itu, bahwa sebaiknya mereka meninggalkan kebohongan dan bersikap jujur kepada masyarakat. Apalagi di era komunikasi dewasa ini, sumber dan sarana informasi telah meningkat pesat dan masyarakat bisa dengan bebas mendapat berita dari berbagai sumber, termasuk dari berbagai situs internet.

Di pihak lain, sebagaimana yang ditekankan oleh Hassan Harishah, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Dewan Palestina, hasil polling Uni Eropa yang menyebutkan bahwa rezim Zionis adalah ancaman bagi perdamaian, membuktikan kebenaran perjuangan rakyat Palestina demi kemerdekaan mereka.

terhadap tanah air mereka diakhiri. Selama tiga tahun terakhir, mereka melakukan gerakan Intifadah Masjidil Aqsa.

Namun, perjuangan rakyat Palestina ini dihadapi oleh rezim Zionis dengan pembantaian dan penghancuran. Meskipun media massa Barat berusaha menutup-nutupi kejahatan Israel, tetapi kejahatan itu sedemikian besarnya, sehingga tidak mungkin lagi disembunyikan. Kesadaran Masyarakat Eropa atas fakta kezaliman, penindasan, dan agresi tentara Zionis di bumi Palestina membuktikan hal ini. Dengan demikian, salah satu tujuan gerakan Intifadah telah tercapai, yaitu menyadarkan masyarakat dunia mengenai kondisi rakyat Palestina yang sesungguhnya dan kriminalitas Israel.

Tersingkapnya kriminalitas Israel di kalangan masyarakat Eropa telah menimbulkan kekhawatiran di tengah orang-orang Zionis. Oleh karena itulah mereka dengan amat marah melemparkan kecaman terhadap polling ini. Pejabat Tel Aviv dengan segera mengangkat isu anti-semit dan menuduh mayoritas masyarakat Eropa sebagai anti Yahudi. Padahal, orang-orang Eropa hanya menyebut rezim Zionis Israel yang merupakan ancaman bagi perdamaian karena aksi keji mereka terhadap bangsa Palestina, bukan orang-orang Yahudi.⁴

Sebagaimana biasa, orang-orang Zionis selalu mengedepankan masalah anti-semit atau anti-Yahudi ketika rezim mereka mendapat kecaman atau kritikan. Mereka berusaha menunjukkan bahwa rezim Zionis dan Yahudi adalah satu kesatuan.

Padahal, pemikiran Zionis yang bersifat diskriminatif, tidak agamis, dan fasis tidak ada kaitannya dengan Yahudi. Bagi mereka, agama Yahudi hanya digunakan sebagai pelindung bagi aksi kriminal mereka.

Sementara itu, pengambilan sikap sebagian pejabat Uni Eropa mengenai polling yang dijalankan oleh Komisi Eropa menarik pula untuk diperhatikan. Para pejabat Italia yang merupakan ketua Uni Eropa periode sekarang, menunjukkan ketidaksenangan mereka atas hasil polling ini dan menekankan bahwa hasil polling ini tidak menunjukkan sikap Uni Eropa. Malah Silvio Berlusconi, Perdana Menteri Italia sampai meminta maaf kepada Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel, dalam sebuah kontak telepon. Sebagian dari pejabat Uni Eropa yang lain dalam pidato mereka turut berusaha untuk menghibur rezim Zionis atas hasil polling ini.

Pernyataan keras para pejabat Uni Eropa itu membuktikan betapa besar infiltrasi lobi Zionis di kalangan pemerintah Eropa. Sampai-sampai, sebagian pejabat Eropa bersedia untuk mengabaikan pendapat rakyatnya dan meminta maaf mengenainya. Sebaliknya, beberapa waktu yang lalu Uni Eropa malah mengecam Hamas dan menyebut mereka sebagai teroris ketika serangan militer Zionis terhadap bangsa Palestina mencapai puncaknya. Padahal, gerakan Hamas adalah sebuah perjuangan untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina yang tertindas dan mengusir penjajah dari tanah air mereka. Para pengamat percaya bahwa hasil polling terakhir di Uni Eropa yang menentang rezim Zionis ini mengindikasikan

Surat kabar Inggris, *The Guardian* menulis, Hasil polling ini mengindikasikan peningkatan perpecahan antara Eropa dan Israel. Rakyat Eropa menganggap Israel sebagai pelaku utama gagalnya perundingan damai di Timur Tengah. Selain itu, hasil polling ini memberi peluang untuk menekan pemerintah Eropa agar melakukan kebijakan yang adil dalam masalah Palestina, menghapuskan sikap patuh mereka kepada rezim Zionis, serta mengambil sikap serius terhadap rezim Zionis yang merupakan ancaman besar terhadap keamanan dunia, termasuk keamanan Eropa.

Menteri Urusan Yahudi Diaspora Israel, Natan Sharansky mengatakan, hasil polling itu memperlihatkan Uni Eropa terlibat dalam upaya "brainwashing" secara besar-besaran pada warganya, sehingga melupakan kejahatan yang pernah mereka lakukan terhadap bangsa Yahudi.

Juru bicara Komisi Eropa seperti dikutip *Radio Australia* mengakui temuan itu cukup sah, namun meremehkan artinya, sementara Israel menyebut jajak pendapat itu keterlaluan. Seorang menteri Israel menyerukan kepada Uni Eropa agar menghentikan apa yang dilukiskannya sebagai "fitnah yang merajalela terhadap Israel."⁵

Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa sejak beberapa bulan tetap mempertahankan sikap penolakannya terhadap politik yang dijalankan Israel terhadap Palestina. Pemukiman Yahudi, pembangunan pagar pemisah, dan pembunuhan terarah yang dilancarkan Israel terhadap warga Palestina, tidak dapat diterima Uni Eropa.

Siapa yang menentang politik yang dijalankan pemerintah Israel saat ini dengan alasan yang disampaikan, tidak berarti merupakan sikap anti semitisme. Yang tepat adalah, sejak pecahnya perlawanan Intifada kedua dan serangan tanggal 11 September, di Eropa, dan juga di Amerika Serikat meningkat aksi anti semitisme. Dan juga tepat bila dikatakan bahwa di semua negara Eropa secara laten muncul sikap anti semitisme yang harus dihadapi dengan segala cara.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa apa yang dilakukan Menteri Luar Negeri Israel, agar politisi Eropa tidak melontarkan kritik terhadap politik yang dijalankan pemerintah Israel saat ini merupakan kesalahan besar.

Bila situasi di Timur Tengah semakin memburuk, maka kritik terhadap politik Israel juga akan semakin sengit. Para pengamat juga menilai, jumlah negara anggota Uni Eropa yang kemungkinan bersikap netral dalam konflik Timur Tengah semakin berkurang.

Dikalangan Uni Eropa seiring serangan teror yang dilancarkan kelompok militan Palestina terhadap warga sipil Israel tidak lagi disebut-sebut. Uni Eropa juga tidak intensif membahas peranan Suriah atau Iran dalam aksi serangan teror di Palestina. Prasangka pemerintah Israel terhadap Uni Eropa, dengan gamblang disampaikan Menteri Luar Negeri Silvan Shalom di Brüssel. Sementara itu pimpinan Israel agak cukup lega, karena hasil jajak pendapat yang dilakukan Uni Eropa belum lama berselang, yang mengungkapkan bahwa Israel merupakan ancaman yang paling berbahaya bagi perdamaian dunia, tidak mendapat reaksi yang seragam dari negara anggota.

Uni Eropa Tapi terlepas dari itu semua, sekarang adalah saatnya bagi Israel dan Uni Eropa kembali melakukan pembicaraan tingkat tinggi, untuk menyelamatkan proses perdamaian Timur Tengah yang menghadapi jalan buntu.

D. Pokok Permasalahan

Dari data yang ada di atas dapat di cari pokok permasalahan yang ada yaitu, mengapa Uni Eropa menentang kebijakan Israel ? (studi kasus pembangunan Tembok Pembatas Jalur Gaza).

E. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi mengenai hubungan Uni Eropa dan Israel, akan digunakan Teori Proses Organisasi sebagai kerangka pemikiran. Pemikiran ini diharapkan dapat menjelaskan serta menggambarkan mengenai fenomena yang terjadi pada hubungan kedua entitas tersebut yang sudah terjalin sejak 24 tahun yang lalu.

Teori proses organisasi ini didasarkan pada asumsi bahwa ada individu yang betul-betul bisa menentukan bekerja atau tidaknya suatu individu. Menurut para pendukung teori ini, mesin pemerintahan seolah-olah memiliki dinamika sendiri, bekerja sendiri dengan perilaku dan tujuan sendiri.⁶ Kebijakanaksanaan dibentuk oleh dinamika suatu organisasi tertentu atau oleh proses perpolitikan

⁶ Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989, hal. 61

yang terjadi ketika berbagai birokrasi pemerintah saling berebut kekuasaan, posisi dan pengaruh. Birokrasi itu mengendalikan persepsi dan perspektif anggotanya.

Kendali tersebut membatasi keluwesan dan keaslian perilaku anggota sehingga terjadi kemandekan yang berarti bahwa birokrasi tidak mengerjakan apa-apa tetapi birokrasi hanya mengerjakan pekerjaan rutin yang selama ini dikerjakan tanpa banyak perubahan.

Model ini menggambarkan birokrasi sebagai memiliki pengaruh lebih besar daripada individu yang ada di dalamnya terhadap terjadinya peristiwa. Kemungkinan pengaruh kepribadian para pembuat keputusan terhadap terjadinya memang tidak boleh diabaikan, tetapi kita juga harus mengakui bahwa dalam proses pembuatan keputusan yang semakin birokratis dewasa ini, pengaruh variabel kepribadian terhadap jalannya diplomasi internasional sangat kecil.

Analisis politik luar negeri yang menerapkan perspektif ini biasanya memanfaatkan studi tentang bekerjanya birokrasi yang besar dan rumit. Serta interaksi antar berbagai birokrasi itu sendiri yaitu dalam literatur teori dinamika organisasi untuk memahami perilaku birokrasi. Hal ini adalah analisis tentang bagaimana dinamika organisasi atau perpolitikan antar organisasi pemerintahan bisa mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik luar negeri.

Model proses organisasi bisa digambarkan sebagai berikut, suatu pemerintahan adalah himpunan sejumlah organisasi. Karena itu, keputusan dan tindakan suatu pemerintah bisa dipandang sebagai output dari proses dinamika yang terjadi dalam organisasi-organisasi besar dalam pemerintahan itu.

Sebagian besar pekerjaan dalam organisasi itu adalah pekerjaan rutin. Dan akibat dari sifatnya untuk mengerjakan segala sesuatu setiap organisasi mengembangkan prosedur kerja baku yang harus dipatuhi oleh individu yang terlibat dalam organisasi tersebut. Uni Eropa dalam pekerjaan rutin yang terdapat dalam kebijakan CFSP melihat setiap organisasi di Uni Eropa harus bisa menjaga keamanan dan perdamaian internasional.

Dengan demikian, organisasi itu berfungsi menurut pola perilaku yang sama dan bisa diprediksi. Orang yang bekerja dalam organisasi itu kemudian mengembangkan sikap yang mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan organisasi tersebut. Keputusan apapun yang muncul dari organisasi itu bisa diduga mencerminkan loyalitas dan kebiasaan yang ada dalam organisasi itu.

Model proses organisasi mengakui keterbatasan kemampuan manusia dalam mempertimbangkan semua kemungkinan pilihan yang ada sebelum mengambil keputusan dan didasarkan pada gagasan tentang rasionalitas terbatas. Menurut Herbert Simon, dalam organisasi orang cenderung menerapkan kriteria yang disebutnya "*satisficing*" artinya, orang tidak berusaha mencari kemungkinan pilihan kebijaksanaan yang paling optimum dalam arti hubungan antar saran dan tujuan. Tetapi dalam menelusuri pilhan-pilihan kemungkinan penyelesaian persoalan, mereka akan menghentikan penelusuran itu saat mereka menemukan pilihan yang cukup baik. Mereka lebih cenderung mencari pilihan yang cukup memuaskan daripada berusaha mencari pilihan yang ideal tetapi mungkin tidak

Hal ini bisa menimbulkan beberapa implikasi sebagai berikut ini. *Pertama*, sebagian besar keputusan politik luar negeri dibuat menurut prosedur baku yang ditetapkan jauh sebelum timbulnya situasi tertentu. Prosedur itu dirancang untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan situasi dan di dalamnya telah dirumuskan petunjuk bagaimana menanggapi setiap situasi tersebut.

Pembuatan kebijakan seringkali berwujud proses menyeleksi prosedur mana yang sesuai untuk setiap situasi dan menerapkannya menurut aturan serta petunjuk yang ada. Sebagian besar kegiatan ini melibatkan birokrasi eselon bawah yang bekerja berdasar kerangka prosedur dan kebijakan umum yang diterapkan oleh atasan mereka.

Implikasi *kedua* bagi pimpinan puncak pembuat keputusan yaitu, bahwa sebagian besar keputusan yang dibuat walaupun mungkin dilakukan dalam kerangka prosedur yang sudah disepakati, dilakukan tanpa sepengetahuan dari pimpinan. Ini berarti bahwa pimpinan tersebut tidak dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan sehari-hari dan seringkali harus menghadapi "*fait accompli*".

Implikasi *ketiga* dari proses pembuatan keputusan yang digambarkan dalam proses organisasi adalah adanya kecenderungan mematikan inisiatif dan inovasi. Keputusan yang dibuat cenderung keputusan yang dianggap aman dan yang sesuai dengan prosedur yang ada. Karena prosedur itu dirumuskan berdasar hasil evaluasi atas kebijaksanaan sebelumnya, keputusan yang didasarkan pada prosedur itu tidak mungkin membawa pembaharuan

Para pembuat keputusan tidak akan memperoleh kesempatan untuk mempertimbangkan gagasan-gagasan baru. Kondisi yang mencegah terjadinya inovasi ini bisa dipahami kalau kita mengingat kembali tentang perilaku individu yang cenderung menyesuaikan diri dengan konteks sosialnya.

Karena khawatir dikucilkan apabila punya pandangan atau melakukan tindakan yang sangat menyebalkan dari kebijaksanaan organisasi, para birokrat itu biasanya menyesuaikan diri dengan pandangan organisasinya. Ini juga bisa kita pahami kalau kita melihat kenyataan bahwa pada bawahan cenderung membuat kebijakan yang dianggapnya sesuai dengan pandangan atasannya. Yang juga membuat pembaharuan terhambat adalah kenyataan bahwa banyak keputusan harus melewati berlapis-lapis jenjang organisasi. Keharusan melewati berbagai lapisan itu membuat gagasan-gagasan yang ekstrim dalam suatu usulan keputusan tidak bisa lolos ke atas. Ketika sampai ke puncak, usulan itu sudah kehilangan banyak segi inovatifnya dan yang ada adalah hasil kompromi dengan birokrat di berbagai lapisan sebelumnya.

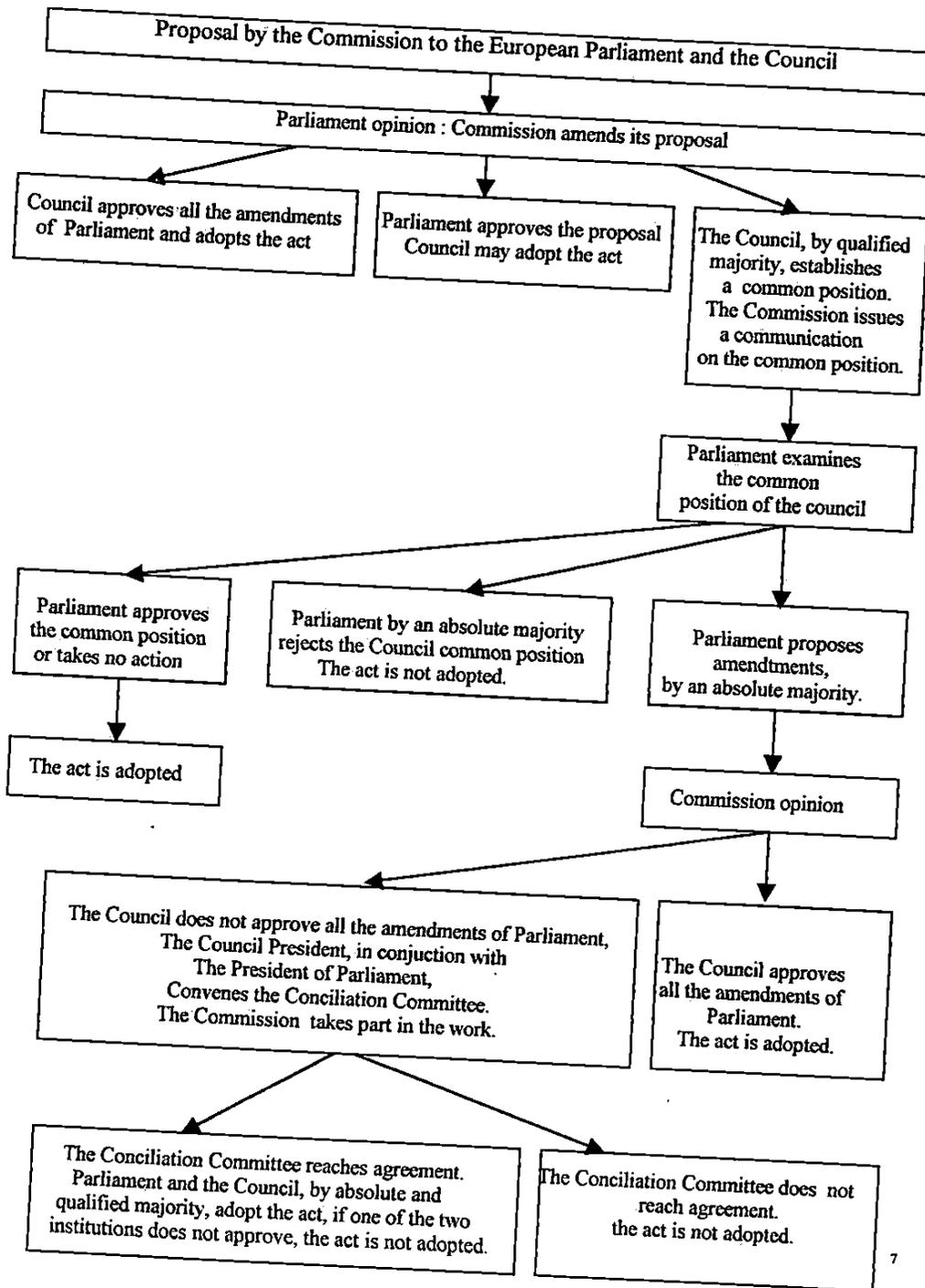
Kurangnya inovasi dan keharusan kompromi ini juga mendorong timbulnya penyakit lesu darah dalam birokrasi. Seringkali perlu waktu bertahun-tahun untuk membuat suatu usulan keputusan menjadi keputusan. Begitu banyak meja yang harus dilalui oleh suatu usulan keputusan sebelum sampai ke tangan pembuat keputusan tertinggi. Akibatnya, banyak pimpinan eksekutif yang tidak sabar dan memotong jalur birokrasi politik luar negerinya apabila harus menangani masalah yang kritis.

Berkaitan dengan ini yaitu masalah memperoleh informasi yang akurat dan mengkomunikasikannya pada pihak-pihak yang memerlukan. Setiap informasi harus diseleksi, dievaluasi dan disaring pada setiap lapisan birokrasi. Jika tidak, pimpinan puncak akan memperoleh banyak informasi dan usulan yang harus diputuskan. Karena itu, peringkasan atas informasi itu harus dilakukan.

Begitu pula harus ada yang memutuskan tentang mana yang perlu diteruskan ke atas dan mana yang cukup diputuskan di tingkat bawah. Dalam hal ini birokrasi tingkat bawah sangat penting. Mereka adalah pejabat yang dilalui oleh sebagian besar informasi dan yang membuat keputusan tentang jenis, frekuensi, arah dan isi komunikasi antar lapisan birokrasi itu. Karena peran ini, para birokrat rendah seringkali menjadi pembuat keputusan yang sebenarnya dan pimpinan eksekutif puncak kadang-kadang menjadi tidak berkuasa.

Dalam model ini, peranan individu sangat kecil. Bahkan pimpinan puncak eksekutifpun dalam model ini digambarkan sebagai tidak banyak berkuasa atas birokrasinya. Ia bisa merubah sedikit kegiatan rutin organisasi itu tetapi tidak akan bisa merubah secara fundamental cara kerja dalam organisasi itu. Artinya dalam model ini, birokrasi digambarkan sebagai aktor yang menetapkan jalannya sendiri dan sedikit untuk memperdulikan sesuatu di luar dirinya. Kejadian dalam politik internasional adalah output dari proses organisasi yang berjalan dalam negara-negara yang terlibat. Aktor penting dalam model ini bukanlah negara atau pemerintah yang monolit, tetapi berwujud berbagai organisasi yang saling berkaitan yang di bawahi oleh para pemimpin pemerintahan

Berdasarkan data di atas, dapat digambarkan sistematika proses pembuatan keputusan Uni Eropa, sebagai berikut:



⁷ European Booklet Documentation, *How the European Union works*, European Commission, Brussel, 2003, hal. 9:

Jika dikaitkan dengan level supranasional European Union maka dapat dilihat pada analisa sistem the Council of the European Union. Lembaga ini adalah badan utama pembuat keputusan Uni Eropa yang beranggotakan seorang menteri dari masing-masing negara anggota Uni Eropa sebagai wakil pejabat pemerintah. Masing-masing menteri tersebut bekerja dalam Dewan untuk menjalankan wewenang yang diberikan kepada mereka dari pemerintahan negara mereka sendiri. Menteri tersebut harus bertanggungjawab terhadap parlemen negaranya dan juga pada rakyat yang diwakilkannya.

Dalam proses pembuatan kebijakan serta penerapan dari kebijakan keamanan dan luar negeri Uni Eropa melibatkan beberapa institusi yang ada di dalam Uni Eropa sendiri. Institusi dan aktor tersebut melaksanakan pertemuan rutin di tingkat politik maupun official, untuk menjamin didapatnya informasi yang lengkap dan memperkuat kerjasama diantara negara negara anggota dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan.

F. Hipotesa

Berdasarkan uraian dan analisa di atas maka dapat diambil kesimpulan sementara yaitu, Uni Eropa sebagai organisasi pemerintahan Eropa sepakat menentang kebijakan Israel mengenai pembangunan Tembok Pembatas Jalur Gaza dari hasil output keputusan lembaga-lembaga di dalam Uni Eropa. Hal ini merupakan prosedur baku dari kebijakan politik luar negeri Uni Eropa.

G. Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Oleh karena itu, data yang diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah-makalah ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, majalah-majalah, surat kabar dan sumber-sumber lain yang relevan.

H. Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi penelitiannya dari tahun 1999 sampai 2004, yaitu didasarkan pada diadakannya Deklarasi Berlin pada 24 Maret 1999, yang memasukan ide berjalannya negara Palestina. Dan sampai saat ini di mana Uni Eropa berperan aktif dalam proses perdamaian Israel-Palestina.

Namun jangkauan penelitian ini tidak menutup kemungkinan untuk mengikutkan berbagai fenomena dan realita yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini, walaupun berada di luar jangkauan tahun penelitian yang telah ditentukan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam memahami permasalahan di atas, maka penulis mencoba membuat sebuah sistematika penulisan pembahasan permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

Bab. I Merupakan bab pendahuluan yang memuat berbagai berbagai ketentuan metodologis.

Bab. II Berisi mengenai Uni Eropa, yaitu gambaran umum pembentukan Uni Eropa.

Bab.III Penulis akan membahas mengenai lembaga Uni Eropa dan kebijakan luar negeri Uni Eropa (CFSP).

Bab. IV Penulis akan membahas sikap penentangan Uni Eropa terhadap kebijakan Israel.

Bab. V Kesimpulan yang berusaha menegakkan hasil penelitian